

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

KALENGGO, SAIFUL AKBAR

Pembimbing: Prof. Dr.H. Didik Endro Purwoleksono, SH.MH

ILLEGAL LOGGING; CRIMINAL LAW

KKB KK-2 TH 52 / 10 Kal k

Copyright: @ 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Tindak pidana illegal logging merupakan kejahatan terstruktur yang dilakukan bukan saja perorangan akan tetapi melibatkan satu kelompok orang atau badan usaha, akibat kejahatan ini menimbulkan berbagai dampak dan kerugian, bukan saja pada kerugian materil tetapi juga menyangkut tatanan ekosistem kehidupan hutan, kondisi hutan bangsa ini telah mengalami penurunan luas secara drastis yang diakibatkan oleh salah satunya adalah pengrusakan hutan dan illegal logging disamping itu adanya perluasan kawasan perkebunan dan pertambangan. Hutan selayaknya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat - aparatnya akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa terlebih masyarakat yang berada atau bermukim dalam kawasan hutan tersebut. Pengamanan kawasan hutan ini terkadang dalam pelaksanaannya telah terjadi tumpang tindih kepentingan terlebih terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi penegak hukum baik antara Polri dan PPNS Kehutanan ataupun dengan institusi penyidik lainnya, tumpang tindih tersebut telah berujung pada kurang harmonisnya hubungan istotusional akan tetapi telah menimbulkan arogansi dan kesewenang - wenangan dalam prakteknya.

Menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metedo penelitian normativ dengan menggunakan pendekatan undang - undang (*Statute Aproach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*) dan pendekatan sejarah (*Historical Aproach*)

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara institusi penegak hukum khususnya dalam tindak pidana illegal logging, selain itu dokumentasi sejarah dan perkembangan PPNS Kehutanan belum dijadikan suatu literatur guna keperluan akademis, sehingga perlu perubahan secara fundamental baik itu aturan hukum maupun peraturan pelaksanaan.

Kata Kunci : Kewenangan PPNS Kehutanan, Tindak Pidana Illegal Logging

ABSTRACT

Crime of illegal logging is a structured crime committed not only individuals but involving a group of persons or legal entities, due to these crimes lead to various impacts and losses, not only in material loss but also about the life of the forest ecosystem structure, forest conditions in this nation has experienced broad decline drastically as a result of one of them is the forest destruction and illegal logging besides the plantation and mining areas expansion. Forest should be used for the benefit of nation and state in order to fulfill the welfare of society at large. Maintenance and protection of forest areas is not just of government responsibility through the forestry civil, but it will be a shared responsibility of all components of society that area in the forest area. Securing this forest area has occurred sometimes in the implementation of overlapping interests' in terms of overlapping authority between law enforcement institution namely police and forestry civil, and other investigation institution, the overlapping has led to the lack of harmony of institutional relationship which raised the arrogance and abuse in practice. Responding to problems in the writing of this thesis, it is used normative method through statute approach, conceptual approach, case approach and history approach

The result of this study shows that there is overlapping authority between law enforcement institutions, specially in the crime of illegal logging, in addition to the documentations, of the history and development of the forestry civil have not made a literature for academic purposes, so the need to fundamentally change either the rule of law and implementing regulations.

Keywords : Forestry Civil Authority, Crime of Illegal Logging